

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Batas Wilayah  
Administrasi
4. Luas Wilayah
5. Jumlah Penduduk
6. Penduduk Miskin
7. Dasar Kehidupan

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan untuk perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

**P**elaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Proses penyusunan LAKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. pemerintah kabupaten disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

LAKIP Pemerintah Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Penyusunan LAKIP ini juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi dan menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.pada masa yang akan datang baik dari segi Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LAKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya . Dengan pendekatan ini, LAKIP juga sebagai proses evaluasi kinerja secara menyeluruh yang tidak terpisahkan dari perbaikan- perbaikan yang berkelanjutan sehingga menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan Kabupaten Aceh Barat melalui perbaikan pelayanan public dalam mewujudkan masyarakat yang makmur ,sehat dan berwawasan.

## 1.3 Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Aceh Barat dengan Ibu kotanya Meulaboh berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Aceh Barat dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- # Sebelah **Utara** : Kabupaten Aceh Jaya, Kab.Aceh Pidie, Kab. Aceh Tengah;
- # Sebelah **Selatan** : Samudera Indonesia dan Kabupaten Nagan Raya;
- # Sebelah **Timur** : Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagan Raya;
- # Sebelah **Barat** : Samudra Indonesia.

## 1.4 Luas Wilayah

Aceh Barat dengan Luas wilayah kekuasaan darat **2.927,95** km<sup>2</sup>, wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 957,38 km<sup>2</sup> dan garis pantai sepanjang 54,84 km yang secara administratif Kabupaten Aceh Barat terbagi dalam 12 Kecamatan, 33 kemukiman, dan 322 gampong / desa. Dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Samatiga merupakan kecamatan yang memiliki

kemukiman terbanyak yaitu 6 (enam) mukim. Sedangkan jumlah gampong terbanyak adalah Kecamatan Kaway XVI dan Woyla dengan masing-masing jumlah gampong adalah

### 1.5 Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2014 sebesar **188.801** jiwa, yang terdiri dari 95.841 jiwa adalah laki-laki dan 92.961 jiwa adalah kaum perempuan. Penduduk terpadat di Kabupaten Aceh Barat berada pada Kecamatan Johan Pahlawan sebanyak **61.189** jiwa atau 32,40 persen dengan komposisi penduduk Laki –laki sebanyak 31.034 jiwa dan penduduk kaum perempuan sebanyak 30.155 jiwa ,kemudian diikuti oleh Kecamatan Meureubo sebanyak **28.863** Jiwa atau sebesar 15,29 persen dan kecamatan Kaway XVI sebanyak **20.713** atau sebesar 10,97 persen, dan penduduk terkecil berada pada kecamatan Sungai Mas dengan jumlah penduduk sebanyak 3.676 jiwa atau sebesar 1,95 persen dengan komposisi kaum laki-laki sebanyak 1.856 jiwa dan penduduk kaum perempuan sebanyak 1.820 jiwa dari jumlah total penduduk Kabupaten Aceh Barat. yang kalau dikalkulasikan terjadinya peningkatan setiap tahun berkisar antara 1,5 % atau 2 %

Tabel.1.1 Data Penduduk Aceh Barat

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Johan Pahlawan	31,034	30,155	61,189
Samatiga	7,342	7,173	14,515
Bubon	3,564	3,523	7,087
Aeongan Lambalek	5,915	5,576	11,491
Woyla	6,531	6,542	13,073
Woyla Barat	3,753	3,673	7,426
Woyla Timur	2,253	2,224	4,477
Kaway XVI	10,594	10,119	20,713
Meureubo	14,850	14,013	28,863
Pante Ceurumeun	5,052	5,098	10,150
Panton Reu	3,097	3,045	6,141
Sungai Mas	1,856	1,820	3,676
Tahun 2014	<b>95,841</b>	<b>92,961</b>	<b>188,801</b>
Tahun 2013	93,962	91,138	185,099
Tahun 2012	92,573	89,791	182,364

Sumber : BPS Aceh Barat  
Buku Dalam Angka 2014.

## 1.6 Penduduk Miskin

Jumlah Penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat tahun 2014 sebesar 24,48 persen dari total jumlah penduduk 188.801 atau sebesar 46.221 jiwa. Angka kemiskinan ini telah mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi sebesar 20,21 persen dan pada tahun 2014 melalui program kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya menekan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat telah mampu menurunkan menjadi 18,48 persen. Meskipun demikian jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat masih tergolong sangat tinggi, jika dibandingkan dengan penduduk miskin yang berada pada Kabupaten lainnya di Propinsi Aceh.

Tabel.1.2 Data Penduduk Miskin tahun 2014

Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga	Urutan Kemiskinan	Persentase
Kaway XVI	2.219	1	14,40 %
Woyla	1.935	2	12,55 %
Meureubo	1.741	3	11,30 %
Pante Ceurumeun	1.556	4	10,09 %
Johan Pahlawan	1.552	5	10,07 %
Arongan Lambalek	1.463	6	9,49 %
Woyla Barat	1.156	7	7,50 %
Panton Reu	964	8	6,25 %
Samatiga	811	9	5,38 %
Bubon	803	10	5,21 %
Woyla Timur	785	11	5,09 %
Sungai Mas	422	12	2,73
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>15.407</b>		

Sumber : Bagian Ekonomi Setdakab 2014.

Berdasarkan komposisi urutan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat dapat dengan jelas kita lihat data kemiskinan menurut kecamatan yang penduduknya paling tinggi angka kemiskinan yaitu diatas 10 persen berada pada kecamatan Kaway XVI, kecamatan Woyla, Kecamatan Meureubo, kecamatan Pante Ceureumeun dan kecamatan Johan Pahlawan.

## 1.7 Dasar Kehidupan

Dasar kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Barat sebagai sumber mata pencarian pada umumnya hidup dari hasil pertanian, Kehutanan dan Perkebunan yang mencapai 50,95 persen, seperti petani padi, Palawija dan perkebunan seperti Karet, Kelapa dan kelapa sawit hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakatnya bertempat tinggal di daerah pedesaan, sedangkan posisi kedua diikuti dari hasil perdagangan sebesar 31,60 persen hal ini disebabkan karena sebagian penduduk berada didaerah perkotaan sedang posisi ketiga diikuti dari hasil Kelautan dan Perikanan sebesar 10,45 persen hal ini disebabkan karena sebagian penduduk berada pada bagian pesisir pantai kemudian diikuti dari hasil pertambangan dan pengalihan sebesar, 2,74 persen hal ini disebabkan karena sebagian penduduk bertempat tinggal di daerah perbukitan dan aliran sungai. Untuk lebih jelasnya Hal ini dapat dilihat pada lapangan usaha berikut ini :

Lapangan Usaha	Persentase
Pertanian, Kehutanan, Perkebunan	50,95
Pertambangan Dan Pengalihan	2,74
Perdagangan	31,60
Kelautan dan Perikanan	10,45
Lembaga Keuangan	1,79
Jasa-jasa lainnya	2,47
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>100</b>